KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Bagas Nur Ramadhan

NPP 33.0590

Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: bagasnurramadhan@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement: *Tangerang Regency is an area with a high level of vulnerability to flood disasters. Effective disaster management requires strong cross-sectoral coordination among the Regional Disaster Management Agency (BPBD), relevant regional government agencies, sub-district and village governments, volunteers, and the community. This study analyzes the cross-sectoral coordination mechanism in flood disaster management in Tangerang Regency.* ***Objective:*** *This study aims to analyze the cross-sectoral coordination mechanism in flood disaster management in Tangerang Regency, Banten Province.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with six informants, field observations, and document analysis. Data analysis referred to the interactive model of Miles and Huberman and used B. Guy Peters' coordination theory framework, which includes the dimensions of networks, collaboration, and hierarchy.* ***Results/Findings:*** *The results indicate that coordination through the hierarchical dimension functions most effectively. BPBD, as the leading sector, has clear command authority. Coordination through the network dimension has utilized WhatsApp groups, communication radios, and periodic coordination meetings; however, data integration remains a challenge because information has not yet been integrated in real time. In the collaboration dimension, partnerships among government agencies are already strong through regular meetings and the Integrated Command Post (Posko Terpadu). However, the involvement of volunteers and communities in strategic planning is still limited.* ***Conclusion:*** *This study concludes that cross-sectoral coordination in Tangerang Regency has been implemented fairly well; however, improvements are still needed in data integration, the expansion of partnerships with volunteers, and the enhancement of communication capacity in affected areas.*

Keywords: *Cross-Sectoral Coordination, Disaster Management, Floods, BPBD, Collaboration.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Penanggulangan bencana yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan/desa, relawan, dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada (6 informan), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman dan menggunakan kerangka teori koordinasi B. Guy Peters yang mencakup dimensi jaringan, kolaborasi, dan hirarki. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi melalui dimensi hirarki berjalan paling efektif. BPBD sebagai *leading sector* memiliki otoritas komando yang jelas. Koordinasi melalui dimensi jaringan sudah memanfaatkan grup WhatsApp, radio komunikasi, dan rapat koordinasi berkala, namun keterpaduan data masih menjadi kendala karena belum terintegrasi secara real-time. Pada dimensi kolaborasi, kemitraan antarinstansi pemerintah sudah solid melalui rapat rutin dan Posko Terpadu, tetapi pelibatan relawan dan masyarakat dalam perencanaan strategis masih terbatas. **Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan koordinasi lintas sektor di Kabupaten Tangerang sudah berjalan cukup baik, namun perlu penguatan pada integrasi data, perluasan kemitraan dengan relawan, dan peningkatan kapasitas komunikasi di wilayah terdampak.

Kata Kunci: Koordinasi Lintas Sektor, Penanggulangan Bencana, Banjir, BPBD, Kolaborasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan peringkat kedua negara di dunia yang memiliki resiko bencana yang tinggi. Sepanjang tahun 2024, BNPB mencatat 3.472 kali kejadian bencana di Indonesia dimana bencana hidrometeorologi masih menjadi bencana yang paling dominan terjadi dengan total 3.449 kejadian. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kejadian bencana pada tahun 2023. Akan tetapi, jika dilihat dari dampaknya, kejadian bencana pada tahun 2024 memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dalam hal korban jiwa. Dari pencatatan yang kami lakukan, dalam 1 hari rata-rata terjadi 10 kejadian bencana, baik itu yang berskala kecil, sedang, maupun besar. (BNPB, 2024) Bencana didefinisikan sebagai gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat dalam skala apapun yang disebabkan oleh peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas, sehingga mengakibatkan kerugian dan dampak pada aspek manusia, material, ekonomi, dan lingkungan (Shi et al., 2020).

Dalam skala global, bencana hidromologi seperti banjir menjadi isu besar yang semakin mengancam kehidupan manusia. Dalam 50 tahun terakhir, jumlah bencana yang tercatat telah meningkat lima kali lipat, sebagian didorong oleh perubahan iklim akibat manusia yang memengaruhi cuaca kita secara drastis. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Menurut laporan *World Meteorological Organization (WMO, 2023)* Kabupaten Tangerang, dengan letak geografisnya yang sebagian besar berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh aliran sungai-sungai besar seperti Cisadane, Cimanceuri, dan Cirarab, menjadi langganan bencana hidrometeorologi. Lima sungai yang meluap menggenangi pemukiman yang berada di dekat aliran sungai, seperti Sungai Cisadane yang menggenangi 5 Kecamatan (Curug,

Legok, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga), Sungai Cirarab menggenangi 4 Kecamatan, Sungai Cimanceuri menggenangi 9 Kecamatan, Sungai Cidurian menggenangi 4 Kecamatan, dan Sungai Cisadane menggenangi Kecamatan Kelapa Dua. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tangerang, kejadian banjir lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan: tahun 2018 sebanyak 61 kasus, 2019 sebanyak 22 kasus, 2020 sebanyak 74 kasus, 2021 sebanyak 91 kasus, dan 2024 sebanyak 58 kasus. Peningkatan yang tajam pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa upaya penanganan banjir belum berhasil mengatasi akar permasalahan secara sistemik. sehingga warga di wilayah rawan bencana tidak memiliki kerangka yang memadai untuk mengolah pengetahuan dan pengalaman kebencanaan secara mandiri (Arifin et al., 2021)

Dampak sosial-ekonomi akibat banjir di Kabupaten Tangerang juga cukup besar. Berdasarkan laporan ANTARA News, sebanyak 5.413 jiwa terdampak akibat luapan sungai Cisadane dan intensitas hujan tinggi. Sementara itu, 680 kepala keluarga (KK) di beberapa kecamatan terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil, gangguan aktivitas ekonomi, serta risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat. Mitigasi mengembangkan langkah-langkah dan sumber daya manajemen bencana struktural maupun nonstruktural guna mencegah dan membatasi dampak bencana. Kesiapsiagaan mempersiapkan seluruh personel, fasilitas, perlengkapan, dan rencana tindakan untuk menghadapi kejadian darurat (Cao, 2023). kesiapsiagaan masyarakat dalam program penanggulangan bencana bersifat tidak permanen dan terus berubah sesuai intensitas dukungan yang diterima, sehingga ketiadaan pelatihan rutin akibat keterbatasan anggaran secara langsung menurunkan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana (Hutagalung, 2023).

Sebagai lembaga utama di tingkat daerah, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana, dan komando. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dengan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/Polri, serta aparat kecamatan dan desa. Dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor ini sering kali mengalami hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya komunikasi, dan belum adanya mekanisme komando yang baku. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dianggap sebagai inti dari setiap pendekatan pengurangan risiko. Hal in ini didefinisikan sebagai pendekatan yang berupaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas kelompok rentan dan masyarakat dalam menghadapi, mencegah, atau meminimalkan kerugian jiwa, harta benda, dan lingkungan; meminimalkan penderitaan manusia; dan mempercepat pemulihan (Cantwell-Chavez, 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Beberapa penelitian terdahulu mengenai koordinasi penanggulangan bencana banjir secara garis besar berfokus pada aspek teknis koordinasi antarinstansi, hambatan implementasi, dan evaluasi kinerja tanpa menitikberatkan pada aspek keterpaduan data, sistem komunikasi yang sistematis, serta pelibatan relawan dan masyarakat dalam perencanaan strategis.

Gultom (2023) meneliti koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Serang dan menemukan bahwa koordinasi belum berjalan dengan tepat sasaran karena adanya hambatan internal dan eksternal. Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam (2022) meneliti koordinasi lintas OPD di Kota Tangerang Selatan dan menemukan bahwa masih tingginya egosektoral organisasi perangkat daerah dalam pemeliharaan saluran drainase serta kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas. Aprilia (2024) meneliti koordinasi BPBD Kota Bengkulu dan menemukan bahwa koordinasi telah berjalan dengan cukup baik sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Muzdalifah et al. (2023) meneliti efektivitas koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan menyimpulkan bahwa koordinasi cenderung cukup efektif, namun tantangan utama adalah egosentris instansi pemerintah. Bakti & Fadlurrahman

(2020) meneliti koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo dan menemukan bahwa koordinasi pada kondisi pra, saat, dan pascabencana sudah cukup baik.

Hal ini membuka ruang bagi penelitian ini yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap tiga dimensi koordinasi (jaringan, kolaborasi, dan hirarki) serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan adanya contextual gap, yaitu kesenjangan yang muncul karena perbedaan kondisi daerah dalam penerapan kebijakan koordinasi yang sama.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir yang berulang setiap tahun. Peningkatan jumlah kejadian banjir dari 61 kasus (2018) menjadi 91 kasus (2021) menunjukkan bahwa upaya penanggulangan belum optimal. Koordinasi lintas sektor yang efektif antara BPBD, OPD terkait, relawan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana, namun masih terdapat hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya komunikasi, dan belum adanya mekanisme komando yang baku.

1.4 Penelitian Terdahulu

Gultom, M. W. P. (2023) dalam penelitiannya "Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Banjir Di Kabupaten Serang Provinsi Banten" menganalisis koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir menggunakan teori dari George R. Terry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Serang belum berjalan dengan tepat sasaran dan masih belum sesuai dengan pelaksanaan.

Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam (2022) dalam penelitian "Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan" menganalisis proses koordinasi lintas OPD dalam penanggulangan banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan masih terdapat penyimpangan pekerjaan, pembagian tugas menunjukkan bahwa kesadaran OPD terhadap pekerjaannya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana.

Aprilia, A. (2024) dalam penelitian "Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu" mengungkapkan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah melaksanakan program mitigasi bencana banjir secara komprehensif melalui tiga tahapan (pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana). Kolaborasi yang terjalin antara BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan LSM berjalan secara sinergis, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal koordinasi dan pemenuhan sumber daya.

Muzdalifah, S., et al. (2023) dalam penelitian "Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Banjir Di Kalimantan Selatan" menemukan bahwa koordinasi BPBD dalam penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan cenderung cukup efektif, disimpulkan dari alur koordinasi yang terbentuk baik secara horizontal maupun vertikal. Tantangan utama dalam koordinasi yaitu egosentris instansi pemerintah dalam menyikapi bencana banjir.

Bakti, V. A. & Fadlurrahman, F. (2020) dalam penelitian "Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo" menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo pada kondisi pra, saat, dan pascabencana sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana, yang terlihat melalui mekanisme dasar koordinasi (vertikal dan horizontal).

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang dengan melibatkan berbagai aktor, yaitu BPBD, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan/desa, relawan, dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Gultom (2023) yang berfokus pada koordinasi antar-pemerintahan terkait infrastruktur, Wulandari dan Salam (2022) yang menitikberatkan pada ego sektoral organisasi perangkat daerah, Aprillia (2022) yang mengkaji koordinasi internal BPBD, Muzdalifah dkk. (2023) yang berfokus pada koordinasi inter-pemerintahan tingkat provinsi, serta penelitian Widia Ierdiana dkk. (2025), Bakti dan Fadlurrahman (2020), dan Rita Utami dkk. (2025) yang hanya mengkaji tahapan atau lingkup penanggulangan bencana tertentu. Penelitian ini mengintegrasikan analisis mengenai bentuk koordinasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam satu kajian yang komprehensif. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada lokus penelitian di Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah metropolitan dan kawasan industri dengan tingkat kerawanan banjir tinggi serta kompleksitas aktor yang lebih beragam dibandingkan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis koordinasi lintas sektor yang lebih kontekstual, menyeluruh, dan adaptif dalam mendukung efektivitas penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang dalam penanggulangan bencana banjir. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika hubungan antarinstansi, peran pihak-pihak terkait, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan. Menurut Sukmadinata (2011:73), penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya, baik bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia, dengan menitikberatkan perhatian pada makna, proses, serta keterkaitan antarunsur di dalamnya. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menemukan makna dan pola dari interaksi sosial yang terjadi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, camat, aparat kelurahan, relawan bencana, serta warga terdampak banjir. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman dan menggunakan kerangka teori koordinasi B. Guy Peters yang mencakup dimensi jaringan, kolaborasi, dan hirarki

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu wawancara Informan penelitian terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, camat, aparat kelurahan, relawan bencana, serta warga terdampak banjir. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman dan menggunakan kerangka teori koordinasi B. Guy Peters yang mencakup dimensi jaringan, kolaborasi, dan hirarki, adapun observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan komprehensif tentang proses koordinasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang dalam menangani bencana banjir. Menurut Sugiyono

(2018:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah dan bersifat interaktif antara peneliti dan subjek penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dijabarkan, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yakni diarahkan untuk dapat menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan ke dalam proposal. Karena datanya kualitatif, maka Teknik analisis menggunakan *metode statistic* yang telah tersedia. Data yang digunakan bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Koordinasi Melalui Jaringan

Koordinasi melalui jaringan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang merupakan aspek penting yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor, seperti BPBD, dinas terkait, serta pihak kecamatan dan desa. Jaringan ini terbentuk sebagai upaya untuk mempercepat alur komunikasi dan distribusi informasi dalam situasi darurat maupun mitigasi bencana.

Indikator pertama melalui saluran komunikasi merupakan sarana yang digunakan oleh instansi terkait dalam melakukan koordinasi penanggulangan banjir. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi langsung, serta media digital seperti grup WhatsApp. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang: "Kalau untuk koordinasi, kami tidak hanya mengandalkan satu media saja. Biasanya kami pakai grup WhatsApp lintas OPD karena itu yang paling cepat dan responsif. Selain itu, ada juga radio komunikasi (HT) terutama saat di lapangan karena sinyal kadang tidak stabil. Untuk yang sifatnya resmi, kami tetap gunakan surat dinas atau email, tapi kalau situasi darurat ya komunikasi cepat seperti WA dan HT itu yang paling diandalkan." Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air: "Untuk koordinasi, kami biasanya mengikuti pola yang sudah dibangun oleh BPBD. Jadi ada grup WhatsApp lintas dinas yang aktif, terutama saat musim hujan. Selain itu, di lapangan kami juga menggunakan HT, khususnya untuk tim teknis yang menangani saluran air atau alat berat."

Indikator kedua melalui Informasi merupakan salah satu unsur penting dalam koordinasi melalui jaringan, karena berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan banjir. Informasi yang dibutuhkan meliputi kondisi wilayah terdampak, jumlah korban, serta kebutuhan logistik di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD: "Biasanya kami sudah punya sistem monitoring dari laporan lapangan dan juga koordinasi dengan pihak terkait seperti BMKG atau petugas di titik rawan. Kalau ada indikasi debit air naik, kami langsung sebarkan informasi melalui grup koordinasi. Selain itu, kami juga hubungi langsung dinas terkait seperti PU, Damkar, dan kecamatan supaya mereka bisa siaga." Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa setiap kegiatan penanggulangan bencana harus didukung oleh sistem informasi yang efektif dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang terlibat.

Indikator ketiga melalui Keterpaduan Data, Keterpaduan data merupakan salah satu indikator penting dalam dimensi jaringan, karena berkaitan dengan kesesuaian dan keseragaman data yang digunakan oleh berbagai instansi dalam penanggulangan banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD:
"Kalau dibilang selalu 100% sesuai, ya tidak juga. Di awal kejadian biasanya data masih dinamis karena kondisi di lapangan juga berubah cepat. Tapi kami terus lakukan pembaruan data melalui koordinasi dengan kecamatan, desa, dan relawan. Jadi memang ada proses penyesuaian sampai akhirnya data itu benar-benar valid."
Temuan ini menunjukkan bahwa keterpaduan data dalam koordinasi penanggulangan banjir belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat berdampak pada keterlambatan dalam pengambilan keputusan serta kurang sinkronnya tindakan antarinstansi di lapangan.

3.2 Koordinasi Melalui Kolaborasi

Kolaborasi menekankan adanya kemitraan, kerja sama yang setara, serta pembagian tugas yang jelas di antara para aktor yang terlibat. Dalam konteks penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang, kolaborasi menjadi instrumen vital untuk menyatukan langkah BPBD dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Indikator pertama melalui Kemitraan merupakan fondasi awal dalam membangun kolaborasi yang efektif. Kemitraan diwujudkan melalui adanya komitmen bersama antarinstansi untuk duduk bersama, merumuskan strategi, dan menyamakan persepsi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD:"Ada. Biasanya sebelum masuk musim hujan, kami adakan rapat koordinasi lintas sektor. Di situ kami bahas potensi risiko, kesiapan personel, sampai sarana prasarana. Selain itu, kami juga punya grup koordinasi yang aktif sepanjang waktu, jadi komunikasi tidak hanya saat rapat saja, tapi terus berjalan."Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemitraan tidak hanya terjalin secara temporer saat terjadi bencana, melainkan telah menjadi agenda rutin yang terencana.

Indikator kedua melalui kerja sama merupakan manifestasi nyata dari kolaborasi di lapangan. Indikator ini mengukur bagaimana BPBD dan para mitranya mengintegrasikan sumber daya dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD: "Kami biasanya sudah punya pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya, Dinas PU fokus ke infrastruktur, Damkar ke evakuasi, Dinas Sosial ke logistik, dan relawan membantu di lapangan. Saat kejadian, kami bentuk posko komando, jadi semua koordinasi terpusat di situ."

Indikator ketiga melalui pembagian tugas merupakan elemen krusial dalam kolaborasi yang efektif. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing aktor memastikan seluruh aspek penanganan bencana tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air: "Dalam kondisi darurat, kami tetap mengacu pada BPBD sebagai *leading sector*. Jadi keputusan akhir biasanya ada di BPBD atau komando yang ditunjuk di lapangan. Kami dari dinas teknis mengikuti arahan tersebut, terutama dalam hal prioritas penanganan."

3.3 Koordinasi Melalui Hirarki

Hirarki merupakan pendekatan koordinasi yang paling konvensional dan sering kali menjadi solusi pertama yang dipilih pemerintah ketika menghadapi masalah koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini bergantung pada otoritas vertikal yang berasal dari pusat komando untuk menyelaraskan tindakan berbagai unit organisasi.

Indikator pertama melalui otoritas komando berkaitan dengan kejelasan struktur kepemimpinan dan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu operasi penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD:

"Dalam kondisi darurat, komando tetap ada di BPBD sebagai *leading sector* penanggulangan bencana. Biasanya keputusan diambil oleh kepala pelaksana atau yang ditunjuk di posko komando. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, tetap harus mengacu pada satu komando supaya penanganan tidak terhambat."

Indikator ketiga melalui Resolusi Konflik Dalam setiap interaksi organisasi yang intens, terutama dalam situasi krisis yang sarat tekanan, potensi munculnya konflik atau miskomunikasi antar aktor tidak dapat dihindari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD: "Kalau di lapangan, hal seperti itu pasti pernah terjadi, apalagi dalam kondisi darurat yang penuh tekanan. Biasanya karena miskomunikasi atau perbedaan persepsi tugas. Cara menyelesaikannya, kami langsung klarifikasi di tempat melalui komando lapangan. Jadi pimpinan di lokasi akan meluruskan dan menegaskan kembali pembagian tugas."

3.4 Faktor Penghambat Koordinasi Lintas Sektor

Faktor penghambat dalam Dimensi Jaringan:1.) Belum Terintegrasinya Data Secara Real-Time: Data kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD, dinas teknis, kecamatan, dan relawan seringkali tidak sama, terutama pada awal kejadian banjir. 2.) Gangguan Jaringan Komunikasi di Wilayah Terdampak: Di lokasi banjir yang parah, sinyal telepon seluler seringkali lemah atau hilang. 3.) Keterbatasan Saluran Informasi untuk Masyarakat: Masyarakat terdampak tidak selalu mendapatkan informasi secara langsung dari BPBD.

Faktor penghambat dalam Dimensi Kolaborasi:1.) Tumpang Tindih Tugas di Awal Kejadian: Pada fase awal tanggap darurat, sering terjadi kebingungan dan tumpang tindih antar petugas. 2.) Keterlibatan Relawan dan Masyarakat yang Masih Terbatas: Relawan dan masyarakat lebih sering dilibatkan pada saat pelaksanaan di lapangan, bukan dalam perencanaan strategis.

Faktor penghambat dalam Dimensi Hirarki:1.) Ego Sektoral Antar Instansi: Kadang-kadang masih muncul perbedaan persepsi tentang prioritas penanganan antara dinas teknis. Untuk mengatasi potensi gesekan akibat ego sektoral tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang telah melakukan beberapa upaya, antara lain memperkuat peran Posko Terpadu sebagai pusat komando, mengadakan rapat koordinasi rutin, memberikan kewenangan tegas kepada pimpinan lapangan, serta terus menekankan bahwa tujuan utama penanganan bencana adalah keselamatan masyarakat di atas kepentingan sektoral masing-masing instansi.

3.5 Faktor Pendukung Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung kelancarannya. Faktor pendukung ini berasal dari aspek regulasi, kepemimpinan, sarana prasarana, serta kesadaran bersama antarinstansi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor pendukung tersebut antara lain:1.) Adanya Landasan Hukum yang Jelas: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat yang menempatkan BPBD sebagai *leading sector*. 2.) Komitmen dan Kepemimpinan yang Kuat dari BPBD: Kepala Pelaksana BPBD beserta jajarannya menunjukkan komitmen tinggi dalam mengoordinasikan lintas sektor. 3.) Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Digital: Penggunaan grup *WhatsApp* lintas OPD dan radio komunikasi (HT) menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. 4.) Adanya Posko Terpadu sebagai Pusat Komando: Pembentukan Posko Terpadu saat terjadi banjir menjadi faktor pendukung utama dalam menyatukan gerak lintas sektor. 5.) Kesadaran dan Partisipasi Relawan serta Masyarakat: Relawan dan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat aktif dalam penanggulangan banjir. 6.) Dukungan Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Tangerang secara bertahap terus melengkapi sarana dan prasarana kebencanaan.

3.6 Upaya Dalam Mengatasi Koordinasi Lintas Sektor

Berdasarkan identifikasi hambatan pada dimensi jaringan, kolaborasi, dan hirarki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang bersama instansi terkait dan elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya ini bersifat teknis operasional maupun kebijakan, yang bertujuan memperkuat efektivitas koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan banjir. Upaya Mengatasi Hambatan pada Dimensi Jaringan:1.) Pembaruan dan Verifikasi Data Secara Berkala: BPBD melakukan koordinasi intensif dengan aparat kecamatan, desa, dan relawan untuk terus memutakhirkan data. 2.) Pemanfaatan Beragam Saluran Komunikasi Cadangan: Mengatasi potensi gangguan sinyal, BPBD dan mitra menggunakan radio komunikasi (HT) sebagai tulang punggung komunikasi di lapangan. 3.) Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat: BPBD bersama camat dan lurah secara rutin menyelenggarakan sosialisasi pra-musim hujan.

Upaya Mengatasi Hambatan pada Dimensi Kolaborasi hambatan kolaborasi mencakup tumpang tindih tugas di awal kejadian, keterlibatan relawan yang terbatas, dan koordinasi dengan swasta yang masih insidental. Upaya yang dilakukan: 1.) Penguatan Posko Terpadu sebagai Pusat Komando: Posko terpadu difungsikan tidak hanya untuk komando, tetapi juga untuk menyamakan persepsi dan memperjelas pembagian tugas. 2.) Pelibatan Relawan Secara Bertahap dalam Rapat dan Perencanaan: BPBD mulai mengundang perwakilan relawan dalam beberapa rapat koordinasi.

Meskipun dimensi hirarki berjalan paling efektif, masih terdapat potensi ego sektoral dan perbedaan persepsi prioritas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada Dimensi Hirarki:1.) Penegasan Komando Tunggal di Lapangan: BPBD secara konsisten menegaskan bahwa dalam situasi darurat, seluruh keputusan operasional berada di tangan pimpinan Posko Terpadu. 2.) Rapat Koordinasi Internal dan Simulasi Rutin: Sebelum musim hujan, BPBD mengadakan rapat koordinasi lintas OPD untuk menyamakan persepsi. 3.) Mekanisme Klarifikasi Cepat melalui Komando di Lapangan: Jika terjadi perbedaan pendapat atau miskomunikasi, pimpinan lapangan segera melakukan klarifikasi.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang telah berjalan melalui tiga dimensi utama (jaringan, kolaborasi, dan hirarki), meskipun belum terlaksana secara optimal pada seluruh indikator. Sama halnya dengan temuan Gultom (2023) bahwa koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir belum berjalan dengan tepat sasaran, penelitian ini menemukan bahwa keterpaduan data dan komunikasi masih menjadi kendala utama. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Septi Dwi Wulandari & Rahmat Salam (2022) yang menunjukkan bahwa masih terdapat egosektoral dan kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas.

Berbeda dengan temuan Aprilia (2024) yang menyatakan koordinasi BPBD Kota Bengkulu telah berjalan dengan cukup baik, penelitian ini menemukan bahwa meskipun koordinasi di Kabupaten Tangerang telah berjalan, masih terdapat hambatan struktural seperti keterbatasan sarana komunikasi dan belum terintegrasinya data secara *real-time*. Demikian pula dengan temuan Muzdalifah et al. (2023) yang menyatakan koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan cenderung cukup efektif, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas koordinasi di Kabupaten Tangerang masih terhambat oleh ego sektoral dan keterbatasan pelibatan relawan.

Penemuan penting lainnya adalah bahwa dimensi hirarki berjalan paling efektif dibandingkan dua dimensi lainnya. Hal ini berbeda dengan asumsi penelitian terdahulu yang cenderung menganggap koordinasi horizontal (jaringan dan kolaborasi) lebih dominan.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam situasi darurat, otoritas komando yang jelas dari BPBD sebagai *leading sector* menjadi faktor kunci keberhasilan koordinasi.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik: Pertama, pemanfaatan teknologi komunikasi digital (grup WhatsApp dan HT) telah menjadi faktor pendukung utama dalam percepatan aliran informasi, namun keterbatasan sinyal di wilayah terdampak masih menjadi kendala signifikan. Kedua, partisipasi masyarakat dan relawan telah menjadi *early warning system* yang efektif, namun pelibatan mereka masih bersifat insidental dan belum terlembaga secara formal dalam sistem perencanaan kontinjensi daerah. Ketiga, mekanisme Posko Terpadu terbukti efektif dalam menyatukan gerak lintas sektor, namun pembentukan posko seringkali baru dilakukan setelah bencana terjadi, bukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan rutin. Keempat, koordinasi melalui dimensi hirarki dengan BPBD sebagai *leading sector* telah menciptakan kesatuan komando yang jelas, namun hal ini juga menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada kapasitas dan ketersediaan pimpinan BPBD di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tangerang secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Pertama, koordinasi melalui dimensi jaringan telah terbangun melalui pemanfaatan beragam saluran komunikasi, seperti grup WhatsApp lintas OPD, radio komunikasi (HT), serta rapat koordinasi berkala. Aliran informasi dari BPBD kepada para pemangku kepentingan berlangsung cukup cepat dan efektif, terutama dalam situasi darurat. Namun, pada indikator keterpaduan data, masih ditemukan kendala berupa perbedaan dan dinamika data di awal kejadian bencana yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem. Kedua, koordinasi melalui dimensi kolaborasi antarinstansi pemerintah telah berjalan solid, ditandai dengan adanya rapat koordinasi rutin pra-musim hujan sebagai wadah kemitraan dan mekanisme Posko Terpadu yang menjadi pusat kerja sama dan pembagian tugas saat tanggap darurat. Meskipun demikian, kolaborasi ini masih bersifat terpusat pada aktor pemerintah. Keterlibatan elemen non-pemerintah, khususnya relawan dan masyarakat, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis masih terbatas.

Ketiga, koordinasi melalui dimensi hirarki telah berjalan sangat efektif. Struktur komando jelas dengan menempatkan BPBD sebagai *leading sector* yang memiliki otoritas tertinggi dalam operasi penanggulangan bencana. Prinsip kesatuan komando ini dipatuhi oleh seluruh OPD terkait, sehingga mampu menciptakan kesatuan tindakan di lapangan. Keempat, faktor pendukung utama meliputi landasan hukum yang jelas, komitmen kepemimpinan BPBD, pemanfaatan teknologi komunikasi digital, mekanisme Posko Terpadu, partisipasi relawan dan masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana. Faktor penghambat mencakup belum terintegrasinya data secara real-time, gangguan jaringan komunikasi di wilayah terdampak, tumpang tindih tugas di awal kejadian, keterlibatan relawan yang terbatas, dan ego sektoral antar instansi.

Keterbatasan Penelitian. Adapun keterbatasan penelitian, ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya satu kabupaten, sehingga tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada koordinasi pada tingkat kabupaten dan belum mengkaji secara mendalam koordinasi vertikal antara BPBD Kabupaten Tangerang dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian lanjutan dapat melakukan pembandingan implementasi koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir di beberapa kabupaten/kota guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan generalisabel. Selain itu, penelitian dengan pendekatan kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur secara pasti tingkat efektivitas koordinasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang beserta seluruh perangkat dinas yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh informan dan pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya penelitian ini dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, A. (2024). *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bengkulu*.

Arifin, S., Wicaksono, S. S., Sumarto, S., Martitah, M., & Sulistianingsih, D. (2021). Disaster resilient village-based approach to disaster risk reduction policy in Indonesia: A regulatory analysis. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, *13*(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/JAMBA.V13I1.1021

Bakti, V. A., & Fadlurrahman, F. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Aspirasi*, 11(2), 123–138.

BNPB.(2024). *Buku Data Bencana. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana*

Cantwell-Chavez, D. (2023). Interlocal adaptations to climate in east and southeast Asia: sharing lessons of agriculture, disaster risk reduction, and resource management. In *International Affairs* (Vol. 99, Nomor 3). https://doi.org/10.1093/ia/iiad074

Cao, L. (2023). AI and data science for smart emergency, crisis and disaster resilience. *International Journal of Data Science and Analytics*, *15*(3), 231–246. https://doi.org/10.1007/s41060-02300393-w

Gultom, M. W. P. (2023). *Koordinasi pemerintahan dalam mengatasi banjir di Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Hutagalung, S. S. (2023). Adaptive capacity in the implementation of disaster response village programme in Indonesia: Literature review. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, *15*(1), 1–7 .https://doi.org/10.4102/JAMBA.V15I1.1470

Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani, M. K. (2023). Efektivitas koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dalam penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Social Sciences*, 8(2), 238–249.

Septi Dwi Wulandari, & Salam, R. (2022). Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534–548 .https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2760

Shi, P., Ye, T., Wang, Y., Zhou, T., Xu, W., Du, J., Wang, J., Li, N., Huang, C., Liu, L., Chen, B., Su, Y., Fang, W., Wang, M., Hu, X., Wu, J., He, C., Zhang, Q., Ye, Q., … Okada, N. (2020). Disaster Risk Science: A Geographical Perspective and a Research Framework. *International Journal of Disaster Risk Science*, *11*(4), 426–440. https://doi.org/10.1007/s13753-020-00296-5

World Health Organization. (2018). *Building Resilience: A Key Pillar of Health 2020 and the Sustainable Development Goals*. WHO Regional Office for Europe.

